



## Unbundling Competition

# Episode 4: Undang-Undang Persaingan Usaha di Asia Tenggara – Vietnam

Pada episode ini, Adelaide Luke, yang merupakan partner dan Head of Competition Asia di kantor HSF Hong Kong, dan Justin Gisz, yang merupakan partner dan spesialis persaingan usaha dari Frasers Law Company in Ho Chi Minh, membahas Undang-Undang Persaingan Usaha baru (Undang-Undang) dan pengatur undang-undang persaingan usaha di Vietnam.

Seperti Thailand, Indonesia, dan Singapura, yang telah dibahas di dalam episode kami sebelumnya, Vietnam adalah salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan undang-undang persaingan usaha sekitar dua dekade yang lalu. Namun, karena berbagai alasan, undang-undang ini tidak dilaksanakan dengan baik, dan hanya terdapat sedikit pelaksanaan keputusan mengenai pengawasan merger.

Undang-Undang yang baru akan mulai berlaku pada tahun 2019 bertujuan untuk pelaksanaan kebijakan persaingan usaha yang lebih aktif. Sebelumnya terdapat dua prioritas persaingan usaha yang akan digabungkan menjadi satu badan regulator undang-undang, yaitu National Competition Commission (NCC), dengan kewenangan atas investigasi dan peradilan yang lebih kuat dan mandiri.

Undang-Undang yang baru berbeda secara substansial dari undang-undang yang lama dalam beberapa aspek utama. Salah satunya adalah perpindahan ke pendekatan yang berbasis dampak (effect-based approach) untuk menilai perilaku antipersaingan usaha. Selain apa yang dinamakan sebagai perilaku "hardcore" (seperti perilaku kartel), yang tetap ilegal "per se" (dan tidak lagi tunduk pada suatu "safe harbour" 30% pangsa pasar sebagaimana diatur dalam undang-undang yang lama), NCC sekarang perlu untuk menunjukkan bahwa perilaku yang dimaksud memiliki dampak terhadap persaingan usaha di pasar yang relevan. Undang-undang yang baru mengatur sejumlah faktor yang relevan dalam penilaian ini.

"Posisi dominan" adalah fokus utama dari undang-undang yang lama. Undang-undang baru juga mengatur persangkaan yang dapat dibantah (rebuttable presumption) terhadap posisi dominan di ambang batas bawah senilai 30% untuk suatu perusahaan, atau 50% untuk posisi dominan bersama. Di samping itu, posisi dominan dianggap ada apabila sebuah perusahaan memiliki "kekuatan pasar yang substansial", bahkan jika di bawah ambang batas pangsa pasar.

Mengenai pengawasan merger, aturan notifikasi yang baru menyimpang dari aturan yang lama, berdasarkan mana ambang batas benar-benar berdasarkan pangsa pasar, sehingga membuatnya sulit untuk mengetahui kapan notifikasi harus dilakukan. Aturan yang baru mengatur tiga ambang batas alternatif, berdasarkan pangsa pasar, nilai omset/aset dan nilai transaksi, yang kemungkinan besar mengarah ke peningkatan jumlah notifikasi. Pengendalian akan menjadi unsur terpenting untuk menilai apakah suatu transaksi memerlukan notifikasi, walaupun tidak jelas apakah pengendalian negatif seperti hak veto dapat memicu suatu pengajuan (dan karenanya apakah usaha patungan 50:50 dapat diberitahukan atau tidak).

Sebagaimana dengan undang-undang yang baru di Thailand, yang telah dibahas pada episode pertama kami, Undang-Undang yang baru di Vietnam memang membuat poin-poin tertentu menjadi tidak jelas. Namun, poin-poin tersebut tidak diragukan lagi dapat diselesaikan karena NCC yang baru menjadi lebih aktif.

